www.legalitas.org

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
# NOMOR 1 TAHUN 1994
# TENTANG
# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
# TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Pertama dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintah yang pertama dalam rangka pelaksanaan rencana PJP II yang dimaksudkan juga untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama PJP I, serta untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;

d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1994/95;

e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan bea masuk dan cukai, penerimaan lain-lain, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperoleh dari :
   a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
   b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan;

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.737.100.000.000,00

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.012.000.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp.69.749.100.000.000,00

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Penerimaan pajak sebesar Rp.33.991.900.000.000,00

b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp.6.066.100.000.000,00

c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.386.600.000.000,00

d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 4.292.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan program sebesar nihil

b. Bantuan proyek sebesar Rp. 10.012.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.350.800.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp.69.749.100.000.000,00

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Sektor industri sebesar | Rp. 45.521.732.000,00 |
| 02 | Sektor Pertanian dan Kehutanan sebesar | Rp. 152.637.768.000,00 |
| 03 | Sektor Pengairan sebesar | Rp. 21.369.974.000,00 |
| 04 | Sektor Tenaga kerja sebesar | Rp. 88.065.861.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan Koperasi sebesar | Rp. 23.467.942.759.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar | Rp.183.730.798.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar | Rp. 49.673.617.000,00 |
| 08 | Sektor Pariwisata, pos dan Telekomunikasi sebesar | Rp.12.259.739.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 09 | Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar | Rp.7.206.419.246.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar | Rp.111.057.240.000,00 |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp.2.320.384.129.000,00 |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar | Rp.165.498.275.000,00 |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita anak dan remaja sebesar | Rp. 303.015.780.000,00 |
| 14 | Sektor perumahan dan permukiman sebesar | Rp. 9.691.953.000,00 |
| 15 | Sektor agama sebesar | Rp. 720.750.478.000,00 |
| 16 | Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar | Rp.201.024.031.000,00 |
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp. 427.953.618.000,00 |
| 18 | Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar | Rp.2.213.042.524.000,00 |
| 19 | Sektor politik, hubungan, luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar | Rp. 797.250.478.000,00 |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan sebesar | Rp. 3.853.510.000.000,00 |

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Sektor industri sebesar | Rp. 450.496.000.000,00 |
| 02 | Sektor Pertanian dan Kehutanan sebesar | Rp. 989.630.000.000,00 |
| 03 | Sektor Pengairan sebesar | Rp. 1.687.034.000.000,00 |
| 04 | Sektor Tenaga kerja sebesar | Rp.146.532.000.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan Koperasi sebesar | Rp.736.250.000.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar | Rp.5.225.515.000.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar | Rp. 3.581.922.000.000,00 |
| 08 | Sektor Pariwisata, pos dan Telekomunikasi sebesar | Rp.721.850.000.000,00 |
| 09 | Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar | Rp.5.504.326.000.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar | Rp.452.300.000.000,00 |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp.3.061.310.000.000,00 |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar | Rp.290.221.000.000,00 |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita anak dan remaja sebesar | Rp.1.031.033.000.000,00 |
| 14 | Sektor perumahan dan permukiman sebesar | Rp. 887.922.000.000,00 |
| 15 | Sektor agama sebesar | Rp. 121.870.000.000,00 |
| 16 | Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar | Rp.529.805.000.000,00 |
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp. 111.365.000.000,00 |

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar | Rp.556.991.000.000,00 |
| 19 | Sektor politik, hubungan, luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar | Rp. 157.335.000.000,00 |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan sebesar | Rp. 1.154.593.000.000,00 |

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1994/95 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:

a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;

b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;

c. Realisasi Pengeluaran Rutin;

d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;

e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;

f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.

(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95.

Pasal 9

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1995/96.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 berdasarkan Tambahan dan atau Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) bulan setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

www.Legalitas.org

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1994

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 18

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

# PENJELASAN

# ATAS

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 1 TAHUN 1994

# TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

# TAHUN ANGGARAN 1994/95

## UMUM

Dengan berakhirnya tahun anggaran 1993/94 yang merupakan tahun terakhir Repelita V, maka proses Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah berhasil diselesaikan. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, yaitu Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional maka kebijaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun pertama PJP II tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Sedangkan moralitas pembangunan tetap didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar negara dan idiologi nasional, sehingga dengan demikian tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional ialah manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan dalam Repelita VI, yaitu pembangunan sektor ekonomi, maka peranan sumber daya manusia sangat menentukan. Industri nasional yang didukung kemampuan teknologi, peningkatan ketangguhan pertanian, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi akan menjadi semakin tangguh dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk itu disusunlah program-program pembangunan tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, dengan dimungkinkannya dibentuk dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan. APBN tahun anggaran 1994/95 yang disusun sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dalam rencana operasional tahunan, mengalami penyempurnaan dibandingkan APBN tahun anggaran 1993/94.

Hal ini disebabkan karena GBHN 1993 sebagai pedoman penyusunan APBN tahun anggaran 1994/95 mengalami perkembangan dan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Penyempurnaan APBN tahun anggaran 1994/95 tersebut meliputi pengembangan jumlah sektor dan subsektor serta penyesuaian dan pengintegrasian sektor-subsektor yang berdasarkan penelitian perlu diintegrasikan dalam sektor atau subsektor yang sejenis.

Hasilnya ialah bahwa dalam APBN tahun anggaran 1994/95 telah berkembang menjadi dua puluh sektor dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 1993/94 yang hanya delapan belas sektor. Sedangkan subsektor berkembang menjadi empat puluh tujuh subsektor.

Walaupun masing-masing logi dari Trilogi Pembangunan tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan, tetapi dalam APBN tahun anggaran 1994/95 amat jelas terlihat bahwa logi pemerataan mendapat perhatian yang lebih besar dari logi lainnya. Dari jumlah besaran alokasi dana untuk masing-masing sektor, sektor pembangunan daerah dan transmigrasi mendapat alokasi anggaran dengan urutan besaran nomor satu.

Perhatian yang besar terhadap pembangunan daerah ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin nampak, di samping semakin meningkatnya pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah-daerah guna memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.

Semakin meratanya pembangunan di daerah akan membawa dampak positif pada upaya mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya tersebut semakin meningkat dengan diberikannya bantuan khusus bagi desa tertinggal dalam bentuk Inpres Desa Tertinggal.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta lapangan usaha dan penggalakan pembangunan daerah terbelakang, khususnya kawasan timur Indonesia, ditingkatkan dan diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan makin merata bagi seluruh rakyat.

Masih dalam upaya mengurangi kesenjangan pertumbuhan pembangunan di daerah, khususnya di daerah tingkat II, dalam tahun anggaran 1994/95 ini makin banyak bantuan pembangunan (Inpres) yang diserahkan dalam bentuk " block grant", sehingga pengelolaannya langsung oleh pemerintah daerah tingkat II. Inpres penunjang jalan kabupaten, Inpres penghijauan dan reboisasi, Inpres pasar dan sebagian Inpres SD (rehabilitasi) dijadikan satu dalam Inpres Dati II dan diserahkan dalam bentuk "block grant" tersebut.

Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa titik berat otonomi dititikberatkan di daerah tingkat II.

Di samping sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, maka sektor transportasi, sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, dan sektor pengairan menempati urutan nomor dua, tiga, empat, dan lima, dalam besaran alokasi dananya.

Dalam rangka mengupayakan kemandirian pembiayaan pembangunan, APBN tahun anggaran 1994/95 memperlihatkan bahwa sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan pencapaiannya.

Dalam hal ini penerimaan pajak akan merupakan primadonanya. Untuk mencapai maksud tersebut maka upaya penyempurnaan pelaksanaan dan sistem perpajakan terus ditingkatkan, dengan dilengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Usaha penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penajaman prioritas pembangunan tetap mendapat perhatian.

Kebijaksanaan pengeluaran pembangunan tetap ditujukan untuk menyelesaikan proyek-proyek prioritas serta diarahkan untuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan pengeluaran rutin diperlukan dalam rangka meningkatkan daya guna aparatur negara dan untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan.

Berkenaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, pengawasan yang dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengendaliannya akan terus ditingkatkan. Untuk itu, pengawasan melekat akan banyak membantu, di samping pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pembangunan di bidang perhubungan dan bidang-bidang lainnya akan tetap diteruskan, sehingga keserasian dan keselarasan pertumbuhan nasional dan daerah akan terwujud, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih luas guna mengatasi tekanan pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka APBN tahun anggaran 1994/95 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

a. bahwa perekonomian Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, masih menghadapi tantangan terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;

b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;

c. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini.

Dengan adanya salah pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan.

Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

| | | |
|---|---|---|
| Penerimaan pajak sebesar | | 33.991.900.000.000,00 |
| terdiri dari: | | |
| 0110 | Pajak penghasilan (PPh) | 18.842.900.000.000,00 |
| 0120 | Pajak pertambahan nilai (PPN) | 13.238.600.000.000,00 |

www.legalitas.org

| | | |
|---|---|---|
| 0130 | Pajak lainnya | 281.700.000.000,00 |
| 0134 | Bea meterai | 261.700.000.000,00 |
| 0135 | Bea lelang | 20.000.000.000,00 |
| 0140 | Pajak Bumi dan bangunan (PBB) | 1.628.700.000.000,00 |
| | Penerimaaan bea masuk dan cukai sebesar | 6.066.100.000.000,00 |
| | terdiri dari : | |
| 0210 | Penerimaan bea masuk | 3.443.300.000.000,00 |
| 0220 | Penerimaan cukai | 2.622.800.000.000,00 |
| 0221 | Cukai tembakau | 2.463.700.000.000,00 |
| 0222 | Cukai gula | 81.000.000.000,00 |
| 0223 | Cukai bir | 57.000.000.000,00 |
| 0224 | Cukai alcohol sulingan | 21.100.000.000,00 |
| | Penerimaan lain-lain sebesar | 15.386.600.000.000,00 |
| | terdiri dari : | |
| 0311 | Penerimaan minyak bumi dan gas alam | 12.851.200.000.000,00 |
| 0314 | Pajak ekspor, pungutan ekspor | 16.400.000.000,00 |
| 0315 | Penerimaan dari laba bersih minyak | 2.519.000.000.000,00 |
| | Penerimaan bukan pajak sebesar | 4.292.500.000.000,00 |
| | terdiri dari : | |
| 0320 | Penerimaan bukan pajak, di luar negeri | 17.500.000.000,00 |
| 0330 | Penerimaan khusus | 2.350.000.000.000,00 |
| 0331 | Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara bank pemerintah, BUMN | 1.550.000.000.000,00 |
| 0332 | Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman) | 800.000.000.000,00 |
| 0410 | Penerimaan pendidikan | 261.877.200.000,00 |
| 0411 | Uang pendidikan | 259.141.200.000,00 |
| 0412 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan | 2.736.000.000,00 |
| 0510 | Penerimaan penjualan | 33.972.700.000,00 |
| 0511 | Penjualan hasil pertanian, perkebunan | 890.000.000,00 |
| 0512 | Penjualan hasil peternakan | 2.711.000.000,00 |
| 0513 | Penjualan hasil perikanan | 500.000.000,00 |
| 0514 | Penjualan sitaan, rampasan | 7.888.000.000,00 |
| 0515 | Penjualan rumah, tanah | 327.000.000,00 |
| 0516 | Penjualan barang yang telah dihapuskan, yang lebih, yang rusak | 1.418.600.000,00 |
| 0517 | Penjualan obat-obatan vaksin,hasil farmasi lainnya | 743.000.000,00 |

www.Legalitas.org

| | | |
|---|---|---|
| 0518 | Penjualan penerbitan,potret, film, poster,gambar, peta | 493.500.000,00 |
| 0519 | Penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 6.257.100.000,00 |
| 0521 | Penjualan kendaraan bermotor | 123.500.000,00 |
| 0522 | Penjualan sewa beli | 11.000.000.000,00 |
| 0523 | Penjualan lain-lain | 1.621.000.000,00 |
| | | |
| 0600 | Penerimaan sewa dan jasa | 1.166.726.700.000,00 |
| 0610 | Penerimaan sewa | 14.797.400.000,00 |
| 0611 | Sewa rumah negeri, rumah dinas | 4.527.900.000,00 |
| 0612 | Sewa gedung | 1.997.500.000,00 |
| 0613 | Sewa benda-benda tak bergerak lainnya | 574.000.000,00 |
| 0614 | Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat, kendaraan bermotor | 7.581.000.000,00 |
| 0615 | Sewa lainnya | 117.000.000,00 |
| 0620 | Penerimaan jasa | 1.151.929.300.000,00 |
| 0621 | Penerimaan rumah sakit, dan instansi kesehatan lainnya | 58.024.000.000,00 |
| 0622 | Penerimaan tempat hiburan, taman, museum | 1.390.000.000,00 |
| 0623 | Pemberian surat keterangan | 56.240.000.000,00 |
| 0624 | Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah | 28.000.000.000,00 |
| 0625 | Pemberian hak dan perijinan | 150.159.000.000,00 |
| 0626 | Penerimaan sensor, karantina pengawasan, pemeriksaan | 6.754.000.000,00 |
| 0627 | Penerimaan jasa tenaga,jasa pekerjaan | 89.051.000.000,00 |
| 0628 | Penerimaan jasa dalam urusan nikah,talak,cerai dan rujuk (NTCR) | 15.500.000.000,00 |
| 0629 | Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan | 17.404.000.000,00 |
| 0630 | Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) | 69.788.800.000,00 |
| 0631 | Penerimaan iuran hasil hutan,laut,royalti,denda | 605.984.000.000,00 |
| 0632 | Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin | 1.500.000.000,00 |
| 0633 | Penerimaan jasa kantor catatan sipil | 11.600.000.000,00 |
| 0634 | Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa | 1.000.000.000,00 |
| 0635 | Penerimaan jasa lainnya | 39.534.500.000,00 |
| | | |
| 0710 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan | 13.639.000.000,00 |
| 0711 | Legalisasi,tanda tangan | 3.534.500.000,00 |
| 0712 | Pengesahan surat di bawah tangan | 15.000.000,00 |
| 0713 | Uang meja (leges) | 750.000.000,00 |
| 0714 | Hasil denda,denda tilang | 6.500.000.000,00 |
| 0715 | Ongkos perkara | 820.000.000,00 |
| 0716 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya | 2.200.000.000,00 |
| | | |
| 0800 | Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain | 448.784.400.000,00 |

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

| | | |
|---|---|---|
| 0810 | Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu | 229.900.000,00 |
| 0811 | Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO) | 229.900.000,00 |
| 0830 | Penerimaan lain-lain | 448.554.500.000,00 |
| 0831 | Penerimaan kembali porsekot, uang muka gaji | 463.700.000,00 |
| 0832 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan | 2.324.500.000,00 |
| 0833 | Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh negara | 1.722.600.000,00 |
| 0834 | Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) | 2.000.000.000,00 |
| 0835 | Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) | 30.000.000.000,00 |
| 0836 | Penerimaan anggaran lainnya | 307.043.700.000,00 |
| 0837 | Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN | 100.000.000.000,00 |
| 0838 | Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyetoran dilakukan) | 3.000.000.000,00 |
| 0839 | Penerimaan kembali pensiun daerah otonom | 2.000.000.000,00 |

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1),(2),(3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran Rutin sebesar Rp.42.350.800.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | SEKTOR INDUSTRI | | 45.521.732.000,00 |
| | 01.1 | Subsektor Pertanian | 45.521.732.000,00 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | | 152 637.768.000,00 |
| | 02.1 | Subsektor Pertanian | 92.863.839.000,00 |
| | 02.2 | Subsektor Kehutanan | 59.773.929.000,00 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | | 21.369.974.000,00 |
| | 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 8.874.739.000,00 |
| | 03.2 | Subsektor Irigasi | 12.495.235.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | | 88.065.861.000,00 |
| | 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 88.065.861.000,00 |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, | | 23.467.942.759.000,00 |

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KEUANGAN DAN KOPERASI | | |
| | 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 42.620.071.000,00 |
| | 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 13.081.308.000,00 |
| | 05.4 | Subsektor Keuangan | 23.345.449.877.000,00 |
| | 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 66.791.503.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANSMIGRASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | | 183.730.798.000,00 |
| | 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 14.294.780.000,00 |
| | 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | 16.156.310.000,00 |
| | 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 93.115.731.000,00 |
| | 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 35.770.177.000,00 |
| | 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 24.393.800.000,00 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | 49.673.617.000,00 |
| | 07.1 | Subsektor Pertambangan | 47.251.906.000,00 |
| | 07.2 | Subsektor Energi | 2.421.711.000,00 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI | | 12.259.739.000,00 |
| | 08.1 | Subsektor Pariwisata | 8.625.583.000,00 |
| | 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 3.634.156.000,00 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | | 7.206.419.246.000,00 |
| | 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 7.160.542.800.000,00 |
| | 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 45.876.446.000,00 |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | | 111.057.240.000,00 |
| | 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | 3.219.183.000,00 |
| | 10.2 | Subsektor Tata Ruang | 107.838.057.000,00 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | 2.320.384.129.000,00 |
| | 11.1 | Subsektor Pendidikan | 2.109.751.345.000,00 |
| | 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 152.926.394.000,00 |
| | 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 50.913.107.000,00 |
| | 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 6.793.283.000,00 |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA | | 165.498.275.000,00 |
| | 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 165.498.275.000,00 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | | 303.015.780.000,00 |
| | 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 66.398.008.000,00 |

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13.2 | Subsektor Kesehatan | 236.617.772.000,00 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | | 9.691.953.000,00 |
| | 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 6.247.242.000,00 |
| | 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 3.444.711.000,00 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | | 720.750.478.000,00 |
| | 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 105.721.337.000,00 |
| | 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 615.029.141.000,00 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | | 201.024.031.000,00 |
| | 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 133.579.357.000,00 |
| | 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 18.451.527.000,00 |
| | 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | 913.664.000,00 |
| | 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 48.079.483.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | | 427.953.618.000,00 |
| | 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 379.985.787.000,00 |
| | 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 477.967.831.000,00 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | | 2.213.042.524.000,00 |
| | 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 2.064.873.483.000,00 |
| | 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 148.169.041.000,00 |
| 19 | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA | | 797.250.478.000,00 |
| | 19.1 | Subsektor Politik | 46.762.650.000,00 |
| | 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | 551.007.708.000,00 |
| | 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 199.480.120.000,00 |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN | | 3.853.510.000.000,00 |
| | 20.1 | Subsektor ABRI | 3.853.360.683.000,00 |
| | 20.2 | Subsektor Pendukung | 149.317.000,00 |

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

www.Legalitas.org

Pengeluaran Anggaran pembangunan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

| | | Rupiah | Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **SEKTOR INDUSTRI** | **143.856.000.000,00** | **306.640.000.000,00** | **450.496.000.000,00** |
| 01.1 | Subsektor Industri | | | 450.496.000.000,00 |
| | | 143.856.000.000,00 | 306.640.000.000,00 | |
| **02** | **SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN** | **662.380.000.000,00** | **327.250.000.000,00** | **989.630.000.000,00** |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 656.630.000.000,00 | 299.710.000.000,00 | 956.340.000.000,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | 5.750.000.000,00 | 27.540.000.000,00 | 33.290.000.000,00 |
| **03** | **SEKTOR PENGAIRAN** | **809.434.000.000,00** | **877.600.000.000,00** | **1.687.034.000.000,00** |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 380.533.000.000,00 | 399.600.000.000,00 | 780.133.000.000,00 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 428.901.000.000,00 | 478.000.000.000,00 | 906.901.000.000,00 |
| **04** | **SEKTOR TENAGA KERJA** | **119.412.000.000,00** | **27.120.000.000,00** | **146.532.000.000,00** |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 119.412.000.000,00 | 27.120.000.000,00 | 146.532.000.000,00 |
| **05** | **SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI** | **144.800.000.000,00** | **591.450.000.000,00** | **736.250.000.000,00** |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 16.800.000.000,00 | 0,00 | 16.800.000.000,00 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 38.000.000.000,00 | 241.560.000.000,00 | 279.560.000.000,00 |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | 22.350.000.000,00 | 161.910.000.000,00 | 184.260.000.000,00 |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | 4.800.000.000,00 | 115.950.000.000,00 | 120.750.000.000,00 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusahaan Kecil | 62.850.000.000,00 | 72.030.000.000,00 | 134.880.000.000,00 |
| **06** | **SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA** | **3.606.565.000.000,00** | **1.618.950.000.000,00** | **5.225.515.000.000,00** |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 2.971.260.000.000,00 | 559.320.000.000,00 | 3.530.580.000.000,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | 234.638.000.000,00 | 354.390.000.000,00 | 589.028.000.000,00 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | | 261.060.000.000,00 | |
| | | 205.717.000.000,00 | | 466.777.000.000,00 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 178.450.000.000,00 | 427.020.000.000,00 | 605.470.000.000,00 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi,Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 16.500.000.000,00 | 17.160.000.000,00 | 33.660.000.000,00 |
| **07** | **SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI** | **803.782.000.000,00** | **2.778.140.000.000,00** | **3.581.922.000.000,00** |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | 36.040.000.000,00 | | |
| | | | 31.830.000.000,00 | 67.870.000.000,00 |
| 07.2 | Subsektor Energi | 767.742.000.000,00 | 2.746.310.000.000,00 | 3.514.052.000.000,00 |
| **08** | **SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI** | 69.500.000.000,00 | 652.350.000.000,00 | 721.850.000.000,00 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | 38.000.000.000,00 | 10.730.000.000,00 | 48.730.000.000,00 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 31.500.000.000,00 | 641.620.000.000,00 | 673.120.000.000,00 |
| **09** | **SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI** | **5.119.576.000.000,00** | **384.750.000.000,00** | **5.504.326.000.000,00** |

www.Legalitas.org

www.legalitas.org

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 4.282.151.000.000,00 | 265.740.000.000,00 | 4.547.891.000.000,00 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 837.425.000.000,00 | 119.010.000.000,00 | 956.435.000.000,00 |
| **10** | **SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG** | **243.290.000.000,00** | **209.010.000.000,00** | **452.300.000.000,00** |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | 173.580.000.000,00 | 183.300.000.000,00 | 356.880.000.000,00 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | 69.740.000.000,00 | 25.710.000.000,00 | 95.420.000.000,00 |
| **11** | **SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **2.358.740.000.000,00** | **702.570.000.000,00** | **3.061.310.000.000,00** |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 2.169.971.000.000,00 | 613.360.000.000,00 | 2.783.331.000.000,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 105.621.000.000,00 | 89.210.000.000,00 | 194.831.000.000,00 |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 52.750.000.000,00 | 0,00 | 52.750.000.000,00 |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 30.398.000.000,00 | 0,00 | 30.398.000.000,00 |
| **12** | **SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA** | **244.761.000.000,00** | **45.460.000.000,00** | **290.221.000.000,00** |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 244.761.000.000,00 | 45.460.000.000,00 | 290.221.000.000,00 |
| **13** | **SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA** | **816.593.000.000,00** | **214.440.000.000,00** | **1.031.033.000.000,00** |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 71.125.000.000,00 | 5.080.000.000,00 | 76.205.000.000,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 736.968.000.000,00 | 209.360.000.000,00 | 946.328.000.000,00 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 8.500.000.000,00 | 0,00 | 8.500.000.000,00 |
| **14** | **SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN** | **469.362.000.000,00** | **418.560.000.000,00** | **887.922.000.000,00** |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 444.270.000.000,00 | 396.030.000.000,00 | 840.300.000.000,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 25.092.000.000,00 | 22.530.000.000,00 | 47.622.000.000,00 |
| **15** | **SEKTOR AGAMA** | **112.340.000.000,00** | **9.530.000.000,00** | **121.870.000.000,00** |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 20.590.000.000,00 | 1.860.000.000,00 | 22.450.000.000,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 91.750.000.000,00 | 7.670.000.000,00 | 99.420.000.000,00 |
| **16** | **SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI** | **423.745.000.000,00** | **106.060.000.000,00** | **529.805.000.000,00** |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 117.306.000.000,00 | 30.300.000.000,00 | 147.606.000.000,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu pengetahuan dan Dasar | 52.925.000.000,00 | 18.430.000.000,00 | 71.355.000.000,00 |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 102.827.000.000,00 | 4.380.000.000,00 | 107.207.000.000,00 |
| 16.4 | Subsektor Kelautan | 33.461.000.000,00 | 52.950.000.000,00 | 86.411.000.000,00 |

www.Legalitas.org

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | 28.850.000.000,00 | 0,00 | 28.850.000.000,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Teknologi | 88.376.000.000,00 | 0,00 | 88.376.000.000,00 |
| **17** | **SEKTOR HUKUM** | **101.445.000.000,00** | **9.920.000.000,00** | **111.365.000.000,00** |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 9.718.000.000,00 | 4.430.000.000,00 | 14.148.000.000,00 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 29.630.000.000,00 | 550.000.000,00 | 30.180.000.000,00 |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | 62.097.000.000,00 | 4.940.000.000,00 | 67.037.000.000,00 |
| **18** | **SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN** | **468.721.000.000,00** | **88.270.000.000,00** | **556.991.000.000,00** |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 431.784.000.000,00 | 88.270.000.000,00 | 520.054.000.000,00 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 36.937.000.000,00 | 0,00 | 36.937.000.000,00 |
| **19** | **SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA** | **78.745.000.000,00** | **78.590.000.000,00** | **157.335.000.000,00** |
| 19.1 | Subsektor Politik | 2.850.000.000,00 | 0,00 | 2.850.000.000,00 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | 3.900.000.000,00 | 0,00 | 3.900.000.000,00 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 71.995.000.000,00 | 78.590.000.000,00 | 150.585.000.000,00 |
| **20** | **SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN** | **589.253.000.000,00** | **565.340.000.000,00** | **1.154.595.000.000,00** |
| 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | 2.280.000.000,00 | 0,00 | 2.280.000.000,00 |
| 20.2 | Subsektor ABRI | 535.000.000.000,00 | 565.340.000.000,00 | 1.100.340.000.000,00 |
| 20.3 | Subsetor Pendukung | 51.973.000.000,00 | 0,00 | 51.973.000.000,00 |

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1994.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud Pasal ini ditetapkan pada bulann April 1984

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a,b,c dan d

cukup jelas

Huruf c dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

www.Legalitas.org

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang Susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang Kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

www.Legalitas.org

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3543

---

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS TAHUN 1994

---